

**SKRIPSI**

**ANALISIS SEKTOR BASIS DAN NON BASIS  
PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN  
2015 - 2019**

**TENRY SYAWAL  
A1111 14 022**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SEKTOR BASIS DAN NON BASIS PEREKONOMIAN DI  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 – 2019**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

**TENRY SYAWAL**

**A111 14 022**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS SEKTOR BASIS DAN NON BASIS PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015-2019

Disusun dan diajukan oleh

**TENRY SYAWAL**

**A11114022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar 19 Juli 2021

Pembimbing I



**Prof. Dr. Nursini, SE., MA.**  
NIP. 19660717 199103 2 001

Pembimbing II



**Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.**  
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.**  
19690413 199403 1 003

**SKRIPSI**

**ANALISIS SEKTOR BASIS DAN NON BASIS PEREKONOMIAN DI KABUPATEN  
BULUKUMBA TAHUN 2015 – 2019**

disusun dan diajukan oleh

**TENRY SYAWAL  
A11114022**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **14 September 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	1..... 
2	Dr. Hamrullah, SE., M.Si, CSF.	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3..... 
4	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®  
NIP 19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tenry Syawal  
Nomor Pokok : A11114022  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Sektor Basis dan Non Basis Perekonomian Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019**" adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 September 2021

Yang Menyatakan,



**Tenry Sawal**

No Pokok : **A11114022**

## PRAKATA

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Sektor Basis dan Non Basis Perekonomian Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Teruntuk kedua orang tua (Bapak **Kamaruddin** dan Mama **Nur Asia**), istri (**Nur Asiza**), dan adik penulis (**Fajar**), terima kasih tak terhingga atas kasih sayang dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dalam keadaan apapun.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam penyusunan tugas akhir ini, diantaranya:

1. **Prof. Dr. Nursini, SE., MA** dan **Dr. Hamrullah, SE., M.Si, CSF.** selaku dosen pembimbing, serta **Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA** dan **Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.** selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan dan motivasi selama pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini.
2. **Dr. Fatmawati, S.E., M.Si.** selaku penasehat akademik peneliti. Terima kasih atas segala arahan dan motivasi yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.

3. **Civitas Akademika Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin** yang telah menjadi wadah menuntut ilmu dan membuka wawasan bagi penulis.
4. Teman-teman **Primes 2014** yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan serta berbagai proses yang tak ternilai.

Penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh...***

Makassar, 14 September 2021

**Tenry Syawal**

## ABSTRAK

### **Analisis Sektor Basis dan Non Basis Perekonomian Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019**

### **Analysis of Basic and Non-Basic Sector of the Economy in Bulukumba Regency in 2015-2019**

Tenry Syawal

Nursini

Hamrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019 dan untuk mengetahui sektor basis yang konsisten dalam mendorong percepatatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2015-2019, yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Bulukumba, laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis *Location Quotient* (LQ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis *location quotient* sektor basis Kabupaten Bulukumba pada periode tahun 2015-2019 dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daerah dan dari analisis *Tipologi Klassen* sektor basis konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

**Kata Kunci** : Sektor Basis, Analisis Location Quotient, dan Pertumbuhan Ekonomi.

*This study aims to determine the base sector in the economy of Bulukumba Regency in the 2015-2019 period and to determine the basis sector that is consistent in encouraging the acceleration of economic growth in Bulukumba Regency. The data used in this study is secondary data based on the 2015-2019 time series, sourced from the Bulukumba Regency BPS report, South Sulawesi BPS report, various official websites of the Bulukumba Regency government and the South Sulawesi Provincial Government. The data analysis method used is Location Quotient (LQ) analysis. The results of this study indicate that the location quotient analysis of the base sector of Bulukumba Regency in the 2015-2019 period can meet regional consumption needs and from the Klassen Typology analysis the base sector consistently encourages economic growth in Bulukumba Regency.*

**Keywords:** Base Sector, Location Quotient Analysis, and Economic Growth.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
2.1 Rumusan Masalah .....	10
3.1 Tujuan Penelitian .....	10
4.1 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	12
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah .....	14
2.2 Sektor Basis dan Non Basis .....	16
2.3 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	19
2.4 Pergeseran Sektor Ekonomi.....	21
2.5 Pengembangan Sektor Unggulan Untuk Strategi Pembangunan Daerah.....	21
2.6 Studi Empiris .....	23

2.7 Kerangka Pikir .....	24
2.8 Hipotesis.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	26
3.4 Metode Analisis Data .....	27
3.4.1 Analisis Location Quotient (LQ).....	27
3.4.2 Analisis Tipologi Klassen .....	28
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
4.1.1 Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Bulukumba .....	30
4.1.2 Gambaran Umum Pemerintahan.....	32
4.1.3 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bulukumba.....	32
4.2 Pengujian dan Hasil Data .....	35
4.2.1 Analisis Location Quotient (LQ).....	35
4.2.2 Analisis Tipologi Klassen .....	38
4.3 Pembahasan Sektoral Perekonomian .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 .....	5
Tabel 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bulukumba ( <i>Milyar Rupiah</i> ) Tahun 2015-2019 .....	6
Tabel 1.3	Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 (%) .....	8
Tabel 3.1	Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral .....	29
Tabel 4.1	Batas Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Bulukumba .....	32
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Konstan (Miliaran Rupiah) .....	37
Tabel 4.3	Sektor Basis Perekonomian Kabupaten Bulukumba .....	38
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Indeks LQ Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 4.5	Klasifikasi Sektoral Berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 .....	41
Tabel 4.6	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	26

## DAFTAR GRAFIK

No.	Judul Grafik	Halaman
Grafik 4.1	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2015-2019 .....	44
Grafik 4.2	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2015-2019 .....	45
Grafik 4.3	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Industri Pengolahan Tahun 2015-2019 .....	47
Grafik 4.4	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2015-2019 .....	48
Grafik 4.5	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2015-2019 .....	49
Grafik 4.6	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Konstruksi Tahun 2015-2019	50
Grafik 4.7	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor 2015-2019 .....	51
Grafik 4.8	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2015-2019 .....	53
Grafik 4.9	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2015-2019 .....	54
Grafik 4.10	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Informasi dan Komunikasi Tahun 2015-2019 .....	55
Grafik 4.11	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2015-2019 .....	56
Grafik 4.12	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor <i>Real Estate</i> Tahun 2015-2019 .....	58
Grafik 4.13	Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Jasa Perusahaan Tahun 2015-2019 .....	59

Grafik 4.14 Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2015-2019.....	60
Grafik 4.15 Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Jasa Pendidikan Tahun 2015- 2019.....	61
Grafik 4.16 Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2015-2019 .....	62
Grafik 4.17 Perkembangan Sektor LQ Dari Sektor Jasa Lainnya Tahun 2015- 2019.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, era globalisasi mendorong aktivitas ekonomi maju berkembang tanpa batas baik dalam skala daerah, nasional bahkan internasional. Negara Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dalam pengembangan daerah tentunya dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensesuaikan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal (Arsyad, 2011). Menurut Glasson (1990) kemakmuran suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan (Mangun, 2007).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarigan (2005) memberikan penjelasan bahwa dengan kondisi yang demikian, maka masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah potensi sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta bantuan partisipasi masyarakatnya menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi daerah yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Kondisi perekonomian suatu wilayah atau daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola segala potensi yang dimiliki, serta bijaksana dalam memberikan kebijakan, langkah dan upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Upaya menciptakan kemandirian perekonomian daerah, pengelolaan sumber daya potensial menjadi faktor yang sangat penting, karena akan menjadi



sumber dana dari daerah sendiri serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, disamping dana yang berasal dari pemerintah pusat. Pengelolaan sektor-sektor perekonomian ini untuk menjadi sektor unggulan atau bisa diandalkan akan disesuaikan dengan kapasitas daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan agar terhindar dari kesenjangan ekonomi.

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan basis atau unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang dimiliki negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengeksport produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis, maka sektor tersebut harus mengimpor produk barang atau jasa dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi selatan memiliki luas wilayah 1.154,58 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 420.603 jiwa berdasarkan data dari BPS tahun 2020 yang terbagi kedalam 10 Kecamatan, yang masing-masing wilayah bagian tersebut memiliki karakteristik potensi sumber daya alam yang beragam dan bisa berpeluang menjadi sektor yang dapat diunggulkan sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pentingnya mengidentifikasi sektor basis ini untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Bulukumba karena sektor basis mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan disamping tujuan produksinya untuk memenuhi kebutuhan daerah serta dapat melakukan ekspor keluar daerah. Maka hubungan langsung yang didapatkan oleh pemerintah dalam ekspor ini dapat menarik investor untuk masuk ke daerah menanamkan modalnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan kebijakan yang dapat menciptakan multiplier efek yang tinggi dengan pengelolaan yang baik pada pembentukan sektor-sektor PDRB.

Menurut data PDRB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bulukumba, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015-2019 fluktuatif dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,62%, 6,77%, 6,89%, 5,05%, 5,49%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi paling besar meningkat terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,89%. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,05% walaupun dalam nilai riil PDRB Kabupaten Bulukumba nilainya terus meningkat hal ini bisa terjadi dikarenakan sektor-sektor lain yang pertumbuhannya meningkat dan saling menutupi antar satu sama lain. Melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba yang fluktuatif. Untuk melihat lebih rinci angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba disajikan dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (miliar rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (persen)</b>
2015	6.774,32	5,62%
2016	7.232,84	6,77%
2017	7.730,91	6,89%
2018	8.121,33	5,05%
2019	8.567,46	5,49%

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020*

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 14,21 triliun rupiah dengan kontribusi dari kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,13%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bulukumba memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% di tahun 2019 dimana angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,05% pada tahun 2018. Dengan dukungan dari sektor pertanian yang cukup besar itu telah menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung seperti perdagangan dan pengangkutan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang strukturnya disusun oleh 17 sektor ekonomi. Sektor-sektor perekonomian tersebut merupakan cerminan dari PDRB yang menjadi indikator untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi. Jikalau Pemerintah daerah dapat mengelola sektor-sektor ekonominya menjadi sektor basis yang dapat mengekspor hasil produknya hingga ke daerah lain maka pembentukan PDRB dapat meningkat seiring dengan meningkatnya hasil produk dari sektor basis tersebut sehingga kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan daerah dapat terpenuhi secara maksimal. Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki sektor-sektor ekonomi penopang daerah yang antar sektor satu dengan sektor yang lain memiliki potensi untuk menjadi sektor utama daerah. Adapun 17 sektor tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bulukumba (milyar rupiah) Tahun 2015-2019**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	4.108,04	4.436,09	4.917,88	5.108,85	5.277,24
Pertambangan	228,97	281,75	322,70	372,53	384,75
Industri	660,96	738,05	804,30	858,20	973,45
Listrik dan Gas	11,45	13,16	13,62	14,92	15,94
Air, Sampah dan Daur Ulang	3,22	3,42	3,80	4,11	4,33
Konstruksi	842,47	990,89	1.141,23	1,343,77	1.447,69
Perdagangan	1.396,36	1.678,84	1.888,00	2.165,28	2.443,28
Transportasi	219,67	253,84	276,56	307,38	339,97
Akomodasi	55,25	67,84	82,77	98,28	108,36
Informasi dan Komunikasi	272,88	306,30	363,92	407,89	459,68
Jasa Keuangan	309,48	366,38	402,47	442,49	501,22
Real Estate	380,11	456,58	535,40	549,23	618,54
Jasa Perusahaan	2,77	3,15	3,78	4,31	4,84
Administrasi Pemerintahan	648,17	667,55	717,02	802,42	907,92
Jasa Pendidikan	264,72	312,48	366,81	411,82	427,43
Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	104,23	122,96	143,96	163,52	185,69
Jasa Lainnya	59,68	70,64	84,53	98,91	114,26
<b>PDRB</b>	<b>9.568,40</b>	<b>10.769,94</b>	<b>12.068,74</b>	<b>13.198,92</b>	<b>14.214,59</b>

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015-2019 terjadi perkembangan, dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Secara umum setiap sektoral mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun-ketahun. Pada

tahun 2019 merupakan pencapaian yang paling tinggi selama lima tahun terakhir, hal ini tidak lepas dari peran sektor-sektor ekonomi sebagai penyumbang atas terbentuknya PDRB suatu wilayah. Semakin besar sumbangan atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu daerah.

Peningkatan nilai PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi ke-17 sektor lapangan usaha. Sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah jika dikelola dengan baik dan maksimal maka sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi daerah khususnya Kabupaten Bulukumba.

Selama lima tahun terakhir sektor pertanian memiliki kontribusi cukup besar jika dibandingkan dengan sektor lain. Sampai tahun 2019, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba. Sebesar 37,13% perekonomian Kabupaten Bulukumba di dominasi oleh sektor pertanian, selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17,19% dan kemudian sektor konstruksi sebesar 10,18%. Adapun kontribusi sektor lainnya yang berada di bawah 10 persen. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Bulukumba secara lebih rinci dilihat dari sektor-sektor yang terdapat di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel persentase kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten**  
**Bulukumba ADHB Tahun 2015-2019 (%)**

<b>Lapangan usaha</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pertanian	42,93	41,19	40,75	38,71	37,13
Pertambangan	2,39	2,62	2,67	2,82	2,71
Indutstri	6,91	6,85	6,66	6,50	6,85
Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Air, Sampah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	8,80	9,20	9,46	10,18	10,18
Perdagangan	14,59	15,59	15,64	16,40	17,19
Transportasi	2,30	2,36	2,29	2,33	2,39
Akomodasi	0,58	0,63	0,69	0,74	0,76
Informasi dan Komunikasi	2,85	2,84	3,02	3,09	3,23
Jasa Keuangan	3,23	3,40	3,33	3,35	3,53
Real Estate	3,97	4,24	4,44	4,50	4,30
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Administrasi Pemerintahan	6,77	6,20	5,94	6,08	6,93
Jasa Pendidikan	2,77	2,90	3,04	3,12	3,01
Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	1,09	1,14	1,19	1,24	1,31
Jasa Lainnya	0,62	0,66	0,70	0,75	0,80
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020*

Meskipun sektor pertanian masih sangat dominan, tetapi kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan perlahan-lahan ditahun 2019 hingga mencapai angka 37,13% dari 42,93% ditahun 2015. Sebaliknya sektor lain seperti sektor perdagangan dan kosntruksi menunjukkan peningkatan kontribusi secara perlahan-lahan pula. Perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami

transformasi dari ketergantungan terhadap sektor pertanian kepada sektor-sektor lainnya.

Melihat perkembangan masing-masing sektor ekonomi dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba yang mengalami pasang surut, diperlukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan kontribusi terhadap sektor-sektor ekonomi serta pengkajian terhadap sektor ekonomi basis dan nonbasis yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor basis dan nonbasis dalam pembangunan maka pemerintah dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor ekonomi basis dan dengan berlakunya otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya bagi kesejahteraan masyarakatnya khususnya Kabupaten Bulukumba.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menentukan sektor basis dan non basis Kabupaten Bulukumba diantaranya, Muhammad Jamil (2011) yang hasilnya menentukan sektor pertanian dan jasa-jasa sebagai sektor basis, Supriadi (2015) dengan menggunakan metode LQ dan Shift Share yang hasilnya menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba dengan kriteria tergolong ke dalam sektor basis dan kompetitif atau memiliki daya saing yang kuat di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sektor jasa-jasa. Alasan pemilihan daerah Kabupaten Bulukumba sebagai objek penelitian karena memiliki potensi dari sektor-sektor ekonomi yang bisa menjadi penopang daerah seperti halnya dari sektor pertanian dan sektor pariwisata yang membuat Kabupaten Bulukumba dikenal.

Untuk mengetahui kategori sektor basis dan non-basis dan seberapa besar peranan sektor basis daerah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan perekonomian daerah diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang ditulis dan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Perekonomian Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019?
2. Apakah sektor-sektor basis tersebut secara konsisten merupakan pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kab. Bulukumba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui sektor basis yang konsisten dalam mendorong percepatatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut :



1. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan kepada pemerintah maupun instansi yang terkait dalam melihat sektor basis dan non basis di Kabupaten Bulukumba.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain sehingga mengetahui kategori sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba.
3. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembanguna ekonomi regional dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK). Dimana PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (RPJMD, 2013-2018).

Dalam model solow, kenaikan dalam tingkat tabungan memunculkan periode pertumbuhan yang cepat, tetapi berangsur-angsur pertumbuhan itu melambat ketika kondisi mapan yang baru dicapai. Jadi, meskipun tingkat tabungan yang tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Model pertumbuhan solow, dan model-model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat dan pertumbuhan dalam standar kehidupan suatu negara (Mankiw, 2000).

Menurut teori Neoklasik, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat (Taringan, 2005).

Samuelson dalam Taringan (2005) menyatakan bahwa, setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar

dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Teori pertumbuhan wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta *interrelasi*.

Menurut Sirojuzilam (2008), pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial atau bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Glasson (1977), pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu *endogen* ataupun *eksogen*, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu *endogen*, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu *eksogen* adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut

### **2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja (Ahmad Mahyudi, 2004).

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan Rill per-kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditujukan tiga nilai pokok yaitu: Pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia. Ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2005).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2005).

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru (Subandi, 2014).

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. pertumbuhan ekonomi wilayah adalah perubahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Jadi pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang berpotensi pada daerah tersebut (Taringan, 2005).

## **2.2 Sektor Basis dan Non Basis**

Sektor basis adalah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor nonbasis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries* (Sjafrizal, 1985).

Ricardo dalam Taringan (2005), sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih *unggul* secara relative dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil.

Pada saat ini istilah yang sering dipakai adalah *competitive advantage* (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar negeri/pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah

produk yang dihasilkan bisa dijual di pasar global secara global secara menguntungkan. Hal ini tidak lagi membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara dengan negara lainnya, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global.

Terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Sumber daya alam, teknologi, akses wilayah, pasar, sentra produksi, tenaga kerja, sifat masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis dan nonbasis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*location quotient*). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*) dan non unggulan.

Analisis *Location Quotient* dapat menggunakan variabel tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDRB) di suatu wilayah (Kabupaten) dibandingkan

dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama diprovinsi dimana kabupaten tersebut dalam lingkungnya (Adisasmita, 2005)

Arsyad (2005) berpendapat, ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu, *entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator*. Dengan perannya sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan cara pengembangan suatu usaha sendiri (BUMD). Perannya sebagai *koordinator*, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Perannya sebagai *Fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Perannya sebagai *Stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran. (Arsyad, 2009)

Menurut Adisasmita (2005), aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional.



Menurut Arsyad (2005), teori basis ekonomi ini merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Teori basis ekonomi ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Tiebout, dalam bukunya Nugroho dan Dahuri (2004) Tiebout mengemukakan bahwa pasar ekspor merupakan penggerak utama atau sebagai mesin pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil ekspor mendatangkan pendapatan dan pendapatan tambahan melalui pengaruh pengganda (*multiplier*). Dengan demikian, kegiatan ekspor mengakibatkan pemasukan uang ke dalam wilayah dan dorongan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

### **2.3 Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan pada data PDRB, baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Dimana PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Pendekatan produksi (*Production Approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui nilai tambah (*added value*). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector atau sub sector tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2007).

Pada pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Yang terdiri dari sembilan sector yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun).

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi.

Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

#### **2.4 Pergeseran Sektor Ekonomi**

Menurut Todaro (2003), teori-teori perubahan struktural memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya “surplus tenaga kerja dua sektor” dan Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (*patterns of development*).

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian menurun. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

#### **2.5 Pengembangan Sektor Unggulan Untuk Strategi Pembangunan Daerah**

Menurut Arsyad (2005), permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous depelovment*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Menurut Emma (2014), sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti:

1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi.
2. Sektor yang mempunyai *multiplier effect* yang tinggi.
3. Sektor yang kandungan depositnya melimpah.
4. Memiliki potensi *added value* yang cukup baik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini dalam jurnal Lantemona (2014), ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

## **2.6 Studi Empiris**

Hasriadi, pada tahun 2014 menulis tentang Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kolaka Utara, metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient dan analisis Shift Share. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor basis ( $LQ > 1$ ) di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan pendekatan PDRB yaitu sektor pertanian. Analisis shift share menunjukkan bahwa sektor ekonomi unggulan berdasarkan PDRB adalah sektor pertambangan, sektor industri, gas dan air bersih, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Andi Ayu Puji Lestari, pada tahun 2017 menulis tentang Peranan sektor basis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun, metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient. Hasil penelitian perhitungan LQ terhadap 9 (sembilan) sektor perekonomian di Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan indikator PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001-2012, terdapat 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sektor penggalan dan pertambangan serta sektor perdagangan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,63, 1,01 dan 1,37. Dengan nilai  $LQ > 1$  (satu) yang memiliki arti bahwa sektor tersebut adalah sektor basis atau

dapat memberikan peranan untuk ekspor daerah dan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan.

## 2.7 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.

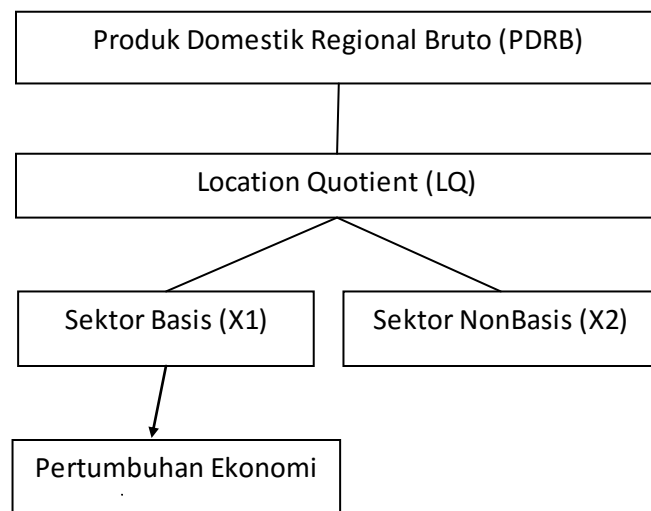
Analisis sektor basis dan nonbasis dengan menggunakan PDRB dapat melihat ukuran kinerja perekonomian suatu daerah, menggambarkan struktur perekonomian daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi baik secara daerah ataupun persektornya. Berdasarkan data yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilihat beberapa informasi yang akan diperoleh tentang:

1. Sektor Basis (X1) merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian atau sektor yang bisa di andalkan pada wilayah yang bersangkutan karena perkembangan sektor tersebut lebih cepat. Pertumbuhan sektor basis dapat menentukan pembangunan secara keseluruhan, dengan barang dan jasa yang di ekspor akan meningkatkan konsumsi dan investasi. Dengan analisis ini maka dapat mengidentifikasi kegiatan sektor ekonomi yang melakukan ekspor.
2. Sektor Nonbasis (X2) merupakan sektor-sektor lainnya yang berfungsi sebagai industri penunjang. Pengelolaan yang baik pada sektor ini bisa meningkatkan permintaan terhadap sektor basis juga dapat meningkatkan permintaan sektor nonbasis. Sektor nonbasis menjadi penentuan konsekuensi dari pembangunan daerah.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi Kabupaten Bulukumba adalah dengan menggunakan metode *Location*

*Quotien (LQ)*, sektor basis dinilai dari kemampuan barang disuatu daerah diekspor ke daerah lain yang bersangkutan. Analisis tersebut dihitung dengan LQ, Jika  $LQ > 1$  maka sektor tersebut basis dan jika  $LQ < 1$  maka sektor tersebut nonbasis. Dengan melakukan analisis tersebut, maka dapat ditentukan sektor apa saja yang berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lain. Dan sektor-sektor yang perkembangannya lebih cepat, sektor itulah yang akan menjadi sektor basis.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga analisis LQ dapat menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019
2. Diduga sektor basis secara konsisten mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019